Journal of Aafiyah Health Research (JAHR) 2024. Vol. 5, No. 1. Page 360-373
https://doi.org/10.52103/jahr.v5i1.1800
P-ISSN: 2722-4929, E-ISSN: 2722-4945

JOURNAL OF AAFIYAH HEALTH RESEARCH (JAHR)

Publisher: *Postgraduate Program, Universitas Muslim Indonesia*
Journal Homepage:
http://pascaumi.ac.id/index.php/jahr/index

Original Article

Implementasi Percepatan Penurunan Kejadian Stunting di Kota Malili Menurut Peraturan Bupati Luwu Timur 2022

Nuranisa, *Reza Aril Ahri, Samsualam

Program Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Article History
Received: 22 May 2024
Revised: 25 June 2024
Accepted: 20 July 2024

Keywords: Implementasi; Kebijakan; Stunting

Corresponding Author:
rezaaril.ahri@umi.ac.id
Address: Jalan. Urip Sumeharjo, No. 5, 90231, Makassar, South Sulawesi, Indonesia

ABSTRAK

Latar Belakang: Masalah gizi pada balita masih menjadi tantangan utama dalam kependudukan, salah satunya adalah stunting. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan percepatan penurunan stunting dengan menekankan pada intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilakukan secara terpadu, holistik, integratif, dan berkualitas. Upaya ini melibatkan kerja sama multisektor di tingkat pusat, daerah, dan desa.

Tujuan: Untuk menganalisis secara mendalam implementasi percepatan Penurunan Kejadian Stunting di Kota Malili Menurut Peraturan Bupati Luwu Timur 2022.

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi implementasi percepatan penurunan stunting melalui indepth interview, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dipilih melalui purposive sampling terhadap 1 orang sebagai informan kunci, dan 9 orang sebagai informan biasa.

Hasil: Kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk mempercepat penanggulangan stunting, yaitu Peraturan Bupati Luwu Timur tahun 2022, didukung oleh keputusan-keputusan lain yang terkait. Peraturan ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting di wilayah tersebut dan telah mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Sumber daya manusia telah dimanfaatkan secara efektif dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah lintas sektor. Dana serta sarana dan prasarana yang mendukung peraturan ini cukup untuk tingkat desa, meskipun masih perlu peningkatan di kelurahan. Pendanaan untuk percepatan penurunan stunting berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan kebijakan di Kecamatan Malili telah berjalan dengan baik. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat, khususnya keluarga dengan balita, tentang kesehatan. Dampak positif dari kebijakan ini adalah penurunan kasus stunting dan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi bagi ibu dan balita.

ABSTRACT

Background: Nutrition problems in children under five are still a major challenge in population, one of which is stunting. To address this problem, the government has established a policy to accelerate stunting reduction by emphasizing specific and sensitive interventions that are carried out in an integrated, holistic, integrative, and quality manner. This effort involves multisectoral cooperation at the central, regional, and village levels.

Objective: To analyze in depth the implementation of accelerating the reduction of stunting incidence in Malili City according to the East Luwu Regent Regulation 2022.

Method: The research method used is descriptive qualitative to explore the implementation of accelerated stunting reduction through in-depth interviews, observation and documentation. Data collection techniques through in-depth interviews were selected through purposive sampling of 1 person as a key informant, and 9 people as ordinary informants.

Results: The East Luwu District Government's policy to accelerate stunting reduction, the East Luwu Regent Regulation 2022, is supported by other related decisions. This regulation aims to reduce the prevalence of stunting in the region and has received positive feedback from the community. Human resources have been utilized effectively by involving various regional apparatus organizations across sectors. Funds and facilities and infrastructure to support this regulation are sufficient at the village level, although improvements are needed in the kelurahan. Funding to accelerate stunting reduction comes from the East Luwu Regency APBD. Policy implementation in Malili sub-district has been going well. The main challenge faced is the lack of knowledge of the community, especially families with children under five, about health. The positive impact of this policy is a decrease in stunting cases and increased community understanding of the importance of nutrition for mothers and toddlers.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

PENDAHULUAN

Penanganan kekurangan gizi pada tingkat global memerlukan upaya yang dimulai dari tingkat nasional masing-masing negara. Pendekatan tersebut dalam mengatasi masalah gizi pada populasi domestik memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya global dalam mengatasi malnutrisi seperti yang direncanakan pada Millenium Development Goals (MDG) di awal tahun 2000 (Unicef, 2013). Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan (Hidayat et al., 2022).

Di Indonesia sendiri pada tahun 2022 Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki strategis dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting (RAN PASTI) untuk mencapai target penurunan stunting hingga 14% pada tahun 2024. Program ini diprioritaskan pada penanganan gizi spesifik dan sensitive pada 1000 hari pertama kehidupan sampai dengan anak usia 6 tahun. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Berdasarkan data prevalensi Stunting yang sudah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa angka persentase Stunting di Indonesia masih terbilang tinggi walau dari tahun ke tahun mengalami tren penurunan yang memuaskan. Dengan adanya situasi tersebut yang seharusnya menjadi perhatian lebih bagi pemerintah maupun masyarakat, perlu adanya suatu program yang dilaksanakan untuk menurunkan angka persentase kasus stunting yang masih tinggi di Indonesia. Sebagai umpan balik dari keadaan Stunting di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota. Salah satu upaya penurunan kejadian stunting dapat dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik untuk mengurangi penyebab secara langsung (sektor kesehatan) dan intervensi gizi sensitif untuk mengurangi penyebab secara tidak langsung (sektor non-kesehatan) (Kementerian PPN/ Bappenas, 2018).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi "bahwa meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan komitmen global dan merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia, bahwa untu mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus menerus". Pemerintah telah menetapkan target penurunan stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya Bersama antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melalui aksi nyata pelaksanaan program dan kegiatan yang konvergen dan terintegrasi. Dalam rangka percepatan penurunan stunting, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 menetapkan Peraturan Presiden yang menerapkan konsep penanganan stunting yang holistik dan integratif dengan melibatkan multisektor dari tingkat pusat hingga desa sehingga dapat menyasar kelompok rentan seperti remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia 0-59 bulan (Peraturan Presiden, 2021).

Provinsi Sulawesi Selatan di tiap tahunnya menargetkan dari 32,4% di tahun 2019 menjadi 29,2% di tahun 2020 sehingga pada tahun 2022, tingkat penurunan stunting menjadi 19,5%. Ada beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang masuk kawasan penderita gizi buruk atau stunting yaitu Kabupaten Enrekang, Bone, Pinrang, Gowa, Pankajene Kepulauan (Pangkep), Tana Toraja, Luwu Timur, Sinjai, Jeneponto, Toraja Utara, Takalar dan Kepulauan Selayar. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan pravelansi stunting di Kabupaten Luwu Timur 23%. (Dinas Kesehatan Sulsel, 2022). Pemerintah Luwu Timur sendiri melakukan penggulangan stunting melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 56 2022 tentang percepatan penurunan stunting, Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor No.209/F-02/VI Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Luwu Timur (Perda Kab Luwu Timur, 2022).

Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 30 Desa pada 8 Kecamatan yang akan menjadi lokasi fokus (Lokus) prioritas pencegahan dan penanganan Stunting terintegrasi tahun 2022. Penetapan desa yang jadi lokus stunting ini tertuang dalam keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 209/ F-02/VI/Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan lokus prioritas pencegahan dan penanganan Stunting terintegrasi tahun 2022. Adapun ke 30

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

desa lokus yang ditetapkan tersebar di 8 kecamatan masing-masing : Kecamatan Towuti 8 Desa, Malili 7 Desa, Burau 6 Desa, Mangkutana 1 Desa, Nuha 2 Desa, Wasuponda 4 Desa dan Kecamatan Angkona 1 Desa. Penetapan desa/kelurahan sebagai lokus sasaran prioritas pencegahan dan penangann Stunting di Lutim berdasarkan hasil analisis situasi prevalensi di Lutim. Dari hasil ini prevalensi Stunting tertinggi sebanyak 18 Desa dan jumlah kasus Stunting tertinggi sebanyak 12 Desa.

Puskesmas Kota Malili salah satu puskesmas yang melaksanakan kadarzi sampai saat ini. Kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya mewujudkan keluarga sadar gizi di Puskesmas Malili yaitu menimbang berat badan dengan rutin, memberikan ASI eksklusif, mengkonsumsi makanan beraneka ragam, menggunakan garam beryodium dan mengkonsumsi suplemen gizi sesuai dengan anjuran. Namun dalam pelaksanaannya program ini belum berjalan optimal karena kendala dari pihak puskesmas. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai Implementasi Percepatan Penurunan Kejadian Stunting Di Kota Malili.

METODE

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Malili. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni-Juli 2024. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dipilih melalui purposive sampling terhadap 1 orang sebagai informan kunci, dan 9 orang sebagai informan biasa. Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara, kamera, handphone untuk merekam suara dan video dan buku catatan.

HASIL

Informasi Mengenai Efektivitas Input

Mengenai efektivitas input ini penulis memperoleh data dari hasil wawancara mengenai peraturan bupati Luwu Timur tentang Penetapan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi Tahun 2022. Adapun isi dari peraturan tersebut:

1. Penetapan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Tahun 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Bupati ini.
2. Lokasi Fokus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi sasaran prioritas pencegahan dan penanganan stunting baik spesifik maupun sensitif oleh semua stakcholder dan Perangkat Daerah terkait Tahun 2022 dengan tidak mengabaikan Desa/Kelurahan lain yang belum menjadi sasaran prioritas pencegahan dan penanganan stunting.
3. Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Tahun Anggaran berjalan; Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dalam wawancaranya diperoleh informasi bahwa bentuk kebijakan salah satunya adalah adanya TPPS (Tim Percepatan Penanggulangan Stunting) untuk mendorong percepatan penurunan stunting dengan keterlibatan seluruh stakeholder dan TPK desa/kelurahan.

Berikut kutipan hasil wawancaranya: *"Tahun 2021 ada TPPS yang dibentuk sama ketua TP PKK. Hj. Sufriaty bilang ada tim percepatan penurunan angka stanting yaitu keterlibatan seluruh stakeholder khususnya tim pendamping yang ada di desa dan kelurahan itu berperan aktif untuk pengidentifikasian atau pendataan. Pas Tahun 2023 pada minlok tentang Penurunan Stunting, Lutim itu targetkan penurunan hingga 14,6%."* (ADK, 53 tahun Informan Kunci) .

Pada tahun 2021, ada inisiatif untuk membentuk sebuah tim yang berfokus pada upaya penurunan angka stunting. Tim ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, untuk mengidentifikasi anak-anak yang mengalami stunting. Kepala dinas Kesehatan Luwu Timur juga mengatakan bahwa kebijakan tentang penanggulangan stunting telah dituangkan dalam peraturan Bupati. Berikut kutipan hasil wawancaranya: *"Kebijakan kita sudah membuat beberapa peraturan bupati kalau tidak salah itu perbup tahun 2022, ada juga yang dalam bentuk perda dan peraturan lain pokoknya luar biasa kebijakan yang kita ambil.*

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

TPPS ini sesungguhnya adalah dalam rangka percepatan, penguatan untuk bagaimana secepat mungkin stanting ini kita tanggulangi di Lutim" (ADK, 53 tahun Informan Kunci).

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah membuat berbagai peraturan, baik di tingkat kabupaten maupun daerah, dan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk mengatasi masalah stunting, menunjukkan komitmen yang kuat dan keinginan untuk melihat hasil yang cepat dan signifikan. Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan komprehensif pemerintah dalam menangani stunting, dengan memperhatikan berbagai aspek terkait, mulai dari kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan. Respon masyarakat di kecamatan Malili setelah diberlakukannya kebijakan terkait penanggulangan stunting sangat baik. Sesuai dengan informasi dari kepala puskesmas Lampia dan Lawakali yang menyatakan bahwa adanya dukungan masyarakat yang telah mengetahui program penanggulanan penurunan stunting. Berikut kutipan hasil wawancaranya: *"Masyarakat disini toh sangat mendukung karena kan dengan adanya edukasi-edukasi tentang stanting mereka bisa menerima. Jadi kita sebar prokes kita sebar surveilens mereka harus hadir di situ."* (AES, 43 Tahun Informan Biasa).

Setelah mendapatkan edukasi tentang stunting, masyarakat menjadi lebih mendukung, menunjukkan bahwa informasi yang benar dan tepat sangat penting untuk mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran. Masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga aktif terlibat dalam upaya pencegahan stunting, seperti yang terlihat dari partisipasi mereka dalam mengikuti protokol kesehatan dan surveilans. Dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat ini menjadi kunci keberhasilan program, karena dengan partisipasi mereka, program pencegahan stunting dapat lebih mudah dilaksanakan dan mencapai tujuannya. Informasi juga dikembangkan oleh Kader Gizi PKM Malili yang menyatakan bahwa masyarakat merespon baik hanya saja perlu terus di edukasi. Berikut kutipan hasil wawancaranya: *"Sejauh ini direspon bagus, karena buktinya semua masyarakat berpartisipasi. Cuma memang ubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat nda segampang itu. Harus secara terus menerus diberi edukasi mengenai ini program."* (NR, 48 Tahun Informan Biasa).

Walaupun masyarakat sudah mulai terlibat, mengubah kebiasaan dan cara berpikir mereka membutuhkan waktu dan upaya yang lebih. Oleh karena itu, edukasi yang terus-menerus harus dilakukan untuk memastikan keberhasilan program pencegahan stunting ini. Respon masyarakat yang lain setelah diberlakukannya kebijakan terkait penanggulangan stunting sangat baik. Sesuai dengan informasi dari kepala puskesmas Lampia dan Lawakali yang menyatakan bahwa adanya dukungan masyarakat yang telah mengetahui program penanggulanan penurunan stunting. Berikut kutipan hasil wawancaranya: *"Sudah dijelaskan mengenai program penanggulanan stunting dimasyarakat, sehingga masyarakat sangat antusias mengenai program tersebut."* (S, 50 Tahun Informan Biasa). Upaya edukasi dan sosialisasi tentang stunting telah membuahkan hasil yang positif. Masyarakat kini lebih peduli dan takut akan dampak buruk stunting sehingga mereka termotivasi untuk mencegah terjadinya stunting pada anak-anak mereka.

Ketersediaan SDM

Untuk mendukung kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Luwu Timur maka ketersedian sumber saya manusia merupakan salah satu faktor yang memiliki peranan penting. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting, semua organisasi perangkat daerah terlibat dalam pencegahan dan penurunan stunting secara lintas sector. Hal ini sesuai dengan pendapat Kadis Kesehatan Lutim. Berikut kutipan hasil wawancaranya: *"Selain dinas kesehatan dan rumah sakit, dinas-dinas terkait terus ketua tim penggerak PKK mulai dari tingkat pemerintah kabupaten kecamatan sampai desa itu sudah terbentuk semuami timnya. Termasukmi juga dikecamatan Malili itu toh. Ada juga TPPS Itu dalam rangka mempercepat pencapaian penurunan stanting di Lutim."* (ADK, 53 tahun Informan Kunci).

Upaya penurunan stunting di Luwu Timur melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan. Dengan adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara berbagai pihak, diharapkan target penurunan stunting dapat tercapai lebih cepat. Hal ini juga dikonfirmasi oleh kepala puskesmas Malili dan Lakawali. *"Lintas sector semua kalau saya undangki termasukmi camat, KUA, babinsa, kapolsek pokoknya semua terlibat"* (AES, 43 tahun Informan Biasa). *"Biasanya datang kalo saya undang itu babinsa, pak desa dan pak RT"* (H, 47 tahun Informan Biasa).

Upaya penurunan stunting melibatkan berbagai pihak dari berbagai sektor, mulai dari pemerintah, agama, hingga keamanan. Semua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menurunkan angka stunting. Untuk ketersediaan minimal SDM kesehatan puskesmas di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat, mengatur mengenai standar tenaga kesehatan puskesmas

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

yang merupakan kondisi minimal agar puskesmas dapat terselenggara dengan baik. Berdasarkan data Jumlah tenaga kesehatan puskesmas di kecamatan Malili kabupaten Luwu Timur:

Tabel 1. Jumlah Tenaga Kesehatan Puskesmas di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

Puskesmas	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Nutrisionis	Tenaga Sanitasi Lingkungan
Malili	6	2	32	30	2	3
Lakawali	3	1	24	39	3	2
Lampia	2	1	16	15	1	1

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, untuk standar tenaga kesehatan:

Tabel 2. Standar Tenaga Kesehatan Puskesmas

Jenis Tenaga	Puskesmas Kawasan Perkotaan	Puskesmas Kawasan Pedesaan		Puskesmas kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil	
	Non Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap
Dokter dan/atau dokter layanan primer	1	1	2	1	2
Dokter Gigi	1	1	1	1	1
Perawat	5	5	8	5	8
Bidan	4	4	7	4	7
Tenaga sanitasi lingkungan	1	1	1	1	1
Nutrisionis	1	1	2	1	2

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan untuk seluruh puskesmas di kecamatan Malili telah memenuhi standar tenaga kesehatan puskesmas. Hal ini di dukung oleh informasi tenaga gizi yang dalam wawancaranya menyatakan bahwa ketersediaan SDM Kesehatan sudah cukup namun belum dapat mendukung kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting dan pengetahuan SDM Kesehatan masih perlu ditingkatkan. Berikut kutipan hasil wawancaranya: "*Banyak sekali kurang. Kurang tenaga, pelatihan, pengetahuan. Na saya saja disini sendiri ja, biasa lagi itu minta bantuanka sama masyarakat disini. Saya ini ku bagi-bagi mami mana yang bisa ku kerja. Mana yang nanti mana yang tanggung jawabku mi kerjai. Na kabupaten lain minimal 3 PNS gizinya na ini saya sendiri. Yang jelas saya hubungi terus tapi kita utamakan yang sebenarnya di puskesmass toh yang bersentuhan langsung dengan sasaran. kami masih butuh sekali SDM sama butuh pelatihan khusus tentang stanting ini. Apalagi tempatta disini jauh dari pusat kota."* (NA, 43 tahun Informan Biasa).

Petugas kesehatan merasa kekurangan tenaga, terutama tenaga gizi, yang menyebabkan beban kerja berat dan sulitnya memberikan pelayanan optimal. Mereka juga merasa memerlukan pelatihan khusus tentang stunting, menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki belum memadai untuk menangani masalah ini secara efektif. Selain itu, mereka harus membagi waktu dan tenaga untuk berbagai tugas, termasuk melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan stunting. Jarak yang jauh dari pusat kota menjadi kendala dalam mengakses sumber daya dan mendapatkan dukungan dari pihak terkait. Upaya yang dilakukan informan dalam mengatasi kekurangan SDM Kesehatan dan pengetahuan masyarakat di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur adalah:

1. Semua OPD, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat harus terlibat dalam program penanggulangan stunting.
2. Selalu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat sebagai peningkatan kesadaran masyarakat.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

3. Untuk menutupi kekurangan SDM Kesehatan, mengoptimalkan kinerja tenaga honorer dalam membantu menjalankan program.
4. Tenaga kesehatan lain dialih fungsikan untuk membantu mengerjakan tugas program dengan SDMK yang kurang.

Informasi didapat melalui wawancara oleh tenaga gizi PKM Lampia yang dalam wawancaranya menyatakan bahwa ketersediaan tenaga masih kurang sehingga di dalam pengerjaan tugas di butuhkan bantuan tenaga honorer dan Sukarelawan. Berikut kutipan hasil wawancaranya: *"Kalau di puskesmas Lampia ada honorer sama sukarela itupun dia hanya membantu dalam program yang memegang program itu tetap PNS. Tapi kalau itu betul di hilangkan pasti kita kewalahan jadi harus ada yang menutupi. Tapi berharap bahwa itu masih ada."* (NA, 43 tahun Informan Biasa).

Tenaga honorer dan sukarelawan berperan penting dalam membantu pelaksanaan program di Puskesmas Lampia, terutama dalam program-program spesifik. Meskipun program utama dipegang oleh PNS, keberadaan tenaga honorer dan sukarelawan sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran program. Jika mereka dihilangkan, akan terjadi kekurangan tenaga yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan. Lebih lanjut lagi oleh kepala puskesmas Lakawali yang dalam wawancaranya menyatakan bahwa ketersediaan SDM Kesehatan masih kurang sehingga bidan atau perawat di alihfungsikan melayani di loket, apotik dan KPR. Berikut kutipan hasil wawancaranya: *"Perawat sama bidang kadang di kasi masuk atau merangkap mulai dari depan loket, apotik, kpr rata-rata bidan sama perawat karena mereka yang cukup banyak disini, jadi kita fungsikan di situ."* (H, 47 Tahun Informan Biasa).

Perawat dan bidan seringkali diberikan tugas tambahan di luar kompetensi mereka, sehingga beban kerja mereka menjadi sangat berat. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya tenaga kesehatan lain, seperti petugas administrasi atau apoteker, sehingga perawat dan bidan harus mengambil alih tugas-tugas tersebut. Penggunaan tenaga perawat dan bidan yang tidak optimal dapat mengurangi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Informasi juga di paparkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Luwu Timur yang menyatakan ketersediaan SDM dalam mendukung peraturan bupati tentang pencegahan dan penanggulangan Stunting di Kabupaten Luwu Timur tidak mencukupi jika hanya tenaga kesehatan yang terlibat. Semua stakeholder harus terlibat dan mengambil peran dalam penanggulangan stunting.

Ketersediaan Dana

Untuk mendukung peraturan bupati di Kabupaten Luwu Timur, maka ketersedian dana merupakan salah satu factor yang memiliki peranan penting. Bersadarkan peraturan Bupati Luwu Timur tentang Penetapan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi Tahun 2022, pada poin nomor 3 telah diatur mengenai anggaran didalam pelaksanaan program. Menurut Tenaga Puskesmas dalam wawancaranya diperoleh informasi bahwa dana untuk membantu penurunan stunting ada APBD yang sudah ada dalam peraturan bupati yang membahasnya. Berikut kutipan hasil wawancaranya: *"Kalau nda salah itu dari APBD lutim"* (AES, 43 tahun Informan Biasa). *"Dananya itu dari APBD lutim yang dikasih ke puskesmas"* (H, 47 tahun Informan Biasa). Dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut berasal dari anggaran pemerintah daerah Luwu Timur.

Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Luwu Timur terkhususnya Kecamatan Malili, maka ketersedian sarana dan prasarana merupakan salah satu factor yang memiliki peranan penting. Sarana dan prasarana untuk penanggulangan tablet, obat cacing, suplementasi zink, vitamin A, Spanduk pencegahan stunting di faskes dan kecamatan, dan bola malagata. Sarana dan prasarana yang tersedia dalam membantu penanggulangan stunting berdasarkan hasil wawancara, seperti: Alat pemeriksa kehamilan, Vitamin A, MMS 180 biji, Antropometri, Alat pengukuran, Alat Pemeriksa Kesehatan (tensi, dsb), Kendaraan roda 2, Kendaraan roda 4 (ambulans dan kendaraan operasional), dsb. Tetapi masih ada kendala dalam ketersediaan sarana dan prasarana, yaitu masih ada Posyandu yang belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap terutama posyandu di tingkat kelurahan karena kurangnya anggaran. Serta media edukasi yang tersedia juga masih terbatas.

Menurut Kader gizi puskesmas Malili dalam wawancaranya diperoleh informasi bahwa tersedia antropometri dalam mendukung kebijakan stunting di kecamatan Malili. Tetapi sarana dan prasarana masih belum meyeluruh tercukupi di seluruh posyandu terutama media edukasi. Berikut kutipan hasil wawancaranya: *"hampir*

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

lengkap semua kalau antropometri kami dipuskesmas tidak ada dibedakan yang desa dengan kelurahan pokoknya posyandu itu kami distribusi semua justru saya lebih mengutamakan kelurahan untuk dilengkapi karena tidak ada dana desa. Tahun ini ada lagi belanja semoga tahun ini semua posyandu sudah ada. Tapi memang banyak sekali kurang, apalagi media edukasinya masih terbatas, di desa yang di pakai buku KIA yang ada. Untuk poster-poster desa, puskesmas yang sediakan karena kan terbatas. Jadi harapannya semua keluarga punya lembar-lembar kartu konseling. Kalau kelurahan saran saya kan sampai sekarang belum ada KPM nya, belum terbentuk di kelurahan karena kendala anggaran, karena biaya proses di bapeda mudah-mudahan ACC karena sampai sekarang dana yang normal saja di potong apalagi ini mengajukan." (NR, 48 tahun Informan Biasa).

Alat antropometri didistribusikan ke semua posyandu tanpa membedakan desa dan kelurahan, namun ada penekanan khusus untuk melengkapi alat di posyandu kelurahan karena keterbatasan dana desa. Media edukasi seperti poster dan buku KIA masih terbatas, terutama di desa, dan pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di kelurahan terkendala oleh anggaran. Lebih lanjut lagi informasi lain juga dikatakan oleh kader gizi puskesmas Lakawali yang mengatakan bahwa tersedia alat pemeriksa kehamilan dan TTD. Tetapi belum semua posyandu memiliki alat. Berikut kutipan hasil wawancaranya: *"Ada contoh alat pemeriksa kehamilan, Tablet penambah darah macam-macam di berikan. Tapi Tidak semua posyandu ada alatnya. Tapi kalau begitu di usulkan ke desa dan desa sementara mengusulkan lagi. Yang tidak ada yah dari puskesmas pinjamkan untuk digunakan."* (SA, 36 tahun Informan Biasa).

Tidak semua posyandu memiliki alat kesehatan yang lengkap, terutama alat tes kehamilan dan tablet penambah darah. Proses pengadaan alat kesehatan, yang melalui usulan dari desa ke tingkat yang lebih tinggi, memakan waktu yang cukup lama. Sebagai solusi sementara, alat kesehatan dipinjamkan dari puskesmas. Ini berarti bahwa layanan atau sistem tersebut belum mencapai tingkat kesempurnaan yang diinginkan dan masih memiliki banyak aspek yang perlu ditingkatkan. Meskipun ada standar tertentu yang menjadi acuan untuk menilai kualitas layanan, kondisi saat ini belum memenuhi standar tersebut. Walaupun belum sempurna, layanan tersebut sudah beroperasi dan digunakan oleh masyarakat. Proses evaluasi dilakukan secara terus-menerus untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi.

Informasi Mengenai Efektivitas Proses

Mengenai efektivitas Proses ini penulis memperoleh data dari hasil Kecamatan malili Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan peraturan Bupati Luwu Timur tentang Penetapan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi Tahun 2022. sudah maksimal terlaksana dengan kerjasama seluruh stakeholder secara lintas sector dan lintas program. Di Kabupaten Luwu Timur untuk pelaksanaan program sudah sesuai. Seluruh program terkait Untuk program Ibu hamil, program ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan, ibu menyusui dan anak usia 7-24 bulan serta program pengembangan menggunakan SOP standar. Informasi dikembangkan oleh kepala puskesmas dan kader gizi puskesmas yang mengatakan bahwa Program yang tercantum dalam peraturan bupati telah terlaksana sesuai dengan SOP. Berikut kutipan hasil wawancaranya: *"Ada. Kalau puskesmas itu harus ada SOPnya semua program"* (AES, 43 tahun Informan Biasa).

Setiap program yang dilaksanakan di puskesmas memiliki SOP yang jelas. SOP ini berfungsi sebagai pedoman atau panduan dalam menjalankan program tersebut secara efektif dan efisien. Lebih lanjut lagi Informasi dikembangkan oleh Kepala Puskesmas dan Luwu Timur terlaksana dengan baik dengan koordinasi tenaga kesehatan. Berikut kutipan hasil wawancaranya: *"Antenatalcare ada bidan, pemberian TTD bidan dan gizi, ada pemberian ada MMS perbotol di kasi peribu hamil. kalau PMT ibu hamil ada. Ada dari desa, puskesmas dan dari pusat. Program malaria, Ada pembagian kelambu di cek dan di swiping"*(S, 50 tahun Informan Biasa).

Terdapat kerjasama yang baik antara sektor gizi dan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dalam memberikan pelayanan ANC. Bidan memiliki peran sentral dalam ANC, termasuk memberikan suplementasi, imunisasi, dan konseling. Ibu hamil mendapatkan suplementasi minimal 90 tablet, yang menunjukkan upaya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) menggunakan bahan lokal seperti bubur kacang hijau, mencerminkan upaya untuk meningkatkan konsumsi makanan bergizi. Program ANC juga mengintegrasikan upaya pencegahan malaria. Selain itu, adanya program HIV/AIDS yang ditangani oleh perawat menunjukkan perhatian terhadap masalah kesehatan reproduksi yang lebih luas. Program ANC di posyandu yang dijelaskan sangat baik dan menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Dengan terus melakukan perbaikan dan inovasi, program ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Monitoring dan Evaluasi program di lakukan melalui Lokakarya mini bulanan untuk internal puskesmas dan Lokakarya mini per-3 bulan untuk lintas sector. Informasi dikembangkan oleh kepala puskesmas dan kader gizi puskesmas yang menjelaskan monitoring dan evaluasi program penanggulangan stunting dilakukan melalui lokakarya mini internal puskesmas dan Lokakarya mini lintas sektor. Evaluasi bulanan terhadap program atau proyek dilaksanakan setiap bulan dengan tujuan mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi masalah, dan merencanakan tindak lanjut. Peserta dari evaluasi bulanan kemungkinan besar terdiri dari tim inti yang terlibat langsung dalam program. Di samping itu, Lokakarya Mini Lintas Sektor dilaksanakan setiap tiga bulan dengan tujuan melakukan evaluasi yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai sektor terkait. Lokakarya ini melibatkan perwakilan dari berbagai sektor yang terkait dengan program dan agendanya mencakup evaluasi kinerja, koordinasi antar sektor, sinergi program, dan potensi kolaborasi.

Petugas pustu belum maksimal dalam mendekati tokoh masyarakat dan masyarakat secara langsung, sementara baik petugas maupun masyarakat masih kurang memahami prosedur dan pentingnya rujukan medis. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, pustu belum sepenuhnya menjalankan fungsinya secara optimal. Permasalahan yang terjadi di pustu menegaskan pentingnya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat desa. Dengan melakukan berbagai upaya, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di pustu dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan.

Informasi Mengenai Efektivitas Output

Mengenai efektivitas output ini penulis memperoleh data dari hasil wawancara mengenai capaian program dan pengetahuan masyarakat terutama ibu hamil dan menyusui setelah menjalankan program penanggulangan Stunting di Kecamatan malili. Capaian program selama diberlakukannya peraturan Bupati Luwu Timur tentang Penetapan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi Tahun 2022, yaitu angka stunting sudah menurun hingga mencapai angka 14,6%. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan pada tahun 2022 yaitu sebesar 22,6% atau naik 2,7% dari angka 19,9% pada tahun 2021. Berdasarkan data stunting yang disajikan EPPBGM per Agustus 2022, Persentase Stunting diKecamatan Malili sebesar 16,16% dan 20,94% untuk keluarga yang berisiko terkena Stunting.

Data tersebut di dukung oleh pernyataan kepala dinas Kesehatan kabupaten luwu timur yang memberikan informasi bahwa dampak sudah sangat luar biasa dengan adanya kebijakan stunting di kabupaten luwu timur dan kedepannya diharapkan seluruh stakeholder dan kader dapat lebih maksimal dalam rangka pecepatan penurunan stunting di kabupaten luwu timur. Berikut kutipan hasil wawancaranya: *"Capaiannya itu mengalami penurunan dari setiap persentase yang ada itu belum berarti kita puas artinya bahwa tim selama ini sudah bekerja sudah mengalami penurunan saya tidak hapal angka-angkanya, pokoknya ada datanya di sana yang pasti sudah menurun tapi kita mau dorong lagi lebih bagus lagi sampai mencapai target yang kita mau"* (ADK, 53 tahun Informan Kunci).

Ada penurunan kinerja atau capaian dari target yang telah ditetapkan. Meskipun tim telah bekerja keras, hasil yang diperoleh belum optimal. Walaupun penurunan ini terjadi, semangat untuk meningkatkan kinerja dan mencapai target yang lebih baik tetap ada. Penurunan capaian merupakan hal yang wajar dalam pelaksanaan suatu program, dan yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif dan mengambil langkah-langkah perbaikan, kita dapat terus meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Data-data kinerja puskesmas dapat diakses oleh masyarakat melalui media sosial, yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Media sosial juga digunakan untuk memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat secara lebih luas dan interaktif. Melalui media sosial, masyarakat dapat memberikan masukan dan umpan balik, sehingga partisipasi dalam program kesehatan meningkat. Selain itu, lokakarya mini memungkinkan evaluasi kinerja secara berkala, sehingga masalah dapat diidentifikasi dan diatasi dengan cepat.

Edukasi kesehatan merupakan kunci keberhasilan dalam mengubah perilaku masyarakat, karena masyarakat sangat mendukung program-program kesehatan ketika mereka mendapatkan informasi yang jelas dan benar. Surveilans kesehatan juga merupakan alat penting untuk memantau kesehatan masyarakat dan mengambil tindakan yang tepat. Upaya edukasi dan surveilans merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan memberikan informasi yang akurat, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Sesuai dengan pernyataan Kadis Kesehatan Kabupaten Luwu timur dalam wawancaranya diperoleh informasi bahwa respon masyarakat sangat baik terkait program penanggulangan stunting yang diadakan di kabupaten Luwu timur dan masyarakat di harapkan bisa turut serta dalam penanggulangan stunting. Berikut kutipan hasil wawancaranya: *"Luar biasa sangat positif karena masyarakat juga sudah takut jangan sampai ada anak keturunannya yang stanting"* (ADK, 53 tahun Informan Kunci).

Masyarakat telah memahami risiko stunting dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak. Rasa takut dan khawatir terhadap stunting menjadi motivasi bagi masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pencegahan. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam program-program yang bertujuan mencegah stunting. Pernyataan ini didukung oleh ibu dan Bapak Balita yang mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan posyandu ibu sedikit memahami bagaimana pola asuh hanya perlu ditingkatkan lagi terkait kesadaran masyarakat. Berikut kutipan hasil wawancaranya: *"makan buah buah kayak makanan sampingannya begini, jangan berhenti kasi asi sebelum umur 2 tahun. begitu. Alhamdulillah anak- anakku ini kayak kebal-kebal ii karena jarang-jarangji sakit"* (R, 40 tahun Informan Biasa). Pernyataan ini menunjukkan kesadaran yang tinggi dari pembicara tentang pentingnya nutrisi untuk tumbuh kembang anak. Pemberian ASI eksklusif dan MPASI yang baik merupakan investasi jangka panjang untuk kesehatan anak.

PEMBAHASAN

Efektivitas Program Berdasarkan Input

Efektivitas program mencerminkan tingkat pencapaian target yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan seberapa besar program tersebut berhasil dalam mewujudkan tujuannya. Efektivitas menjadi tolok ukur untuk menilai kesesuaian antara proses pelaksanaan program dengan hasil dan target yang ingin dicapai. Sebuah program dikatakan efektif apabila usaha dan tindakan yang dilakukan menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan (Norsanti, 2021).

Kebijakan Yang Dilaksanakan

Kebijakan ini merupakan pedoman dasar atau panduan yang mengarahkan tindakan dan aturan yang harus dipatuhi oleh para pengambil dan pelaksana kebijakan, serta pengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Kebijakan ini juga menjadi acuan bagi komponen yang terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian didapatkan informasi bahwa kebijakan untuk penanggulangan Stunting yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur, salah satunya tertuang dalam peraturan Bupati Luwu Timur tentang Penetapan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi Tahun 2022, Bina Posyandu, program rumah gizi, inovasi puskesmas seperti Ibu Cerdas Cegah Stunting dan bolamalagata, dan program intervensi serentak untuk pencegahan stunting.

Penelitian ini selaras dengan temuan (Saputri RA 2019) yang menunjukkan bahwa daerah-daerah prioritas seperti Kabupaten Bangka dan Bangka Barat berinisiatif membuat program-program khusus untuk mempercepat penurunan dan penanggulangan stunting. Kabupaten Bangka Barat, dengan prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah meluncurkan program inovatif yang digagas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, yaitu "Bedah Desaku". Program ini bertujuan untuk mewujudkan desa yang sehat, harmonis, energik, berprestasi, amanah, dan takwa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan juga di dapatkan informasi bahwa respon masyarakat sangat baik dan menerima secara positif terkait dengan adanya peraturan bupati untuk pencegahan stunting yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur tetapi masih perlu terus di edukasi untuk peningkatan kesadaran akan pentingnya masalah gizi dan pola asuh anak.

Penelitian ini mendukung temuan (Annisa Paradillah, 2022) yang menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam penanganan stunting di UPTD Puskesmas Mocongloe telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Meskipun partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, secara keseluruhan program-program penanggulangan stunting yang digagas oleh pemerintah diterima dengan baik oleh masyarakat. Penelitian ini selaras dengan (Dahlia, 2021) yang menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam pencegahan stunting, tidak hanya pada tingkat kelembagaan, tetapi juga pada tingkat masyarakat. Masyarakat memiliki peran sentral dalam mengatur pola gizi mereka sendiri. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa petugas kesehatan dihadapkan pada kendala minimnya kepedulian masyarakat terhadap pola gizi mereka. Hal ini

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

mendorong petugas kesehatan untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi peningkatan kesadaran gizi di masyarakat.

Ketersediaan SDM

Ketersediaan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung efektivitas kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan juga di dapatkan informasi bahwa sebagai upaya untuk pencegahan stunting di kabupaten Luwu Timur maka Bupati dengan melibatkan semua organisasi perangkat daerah seperti dinas Kesehatan, DISDALDUK-KB, BAPPEDA, DPMD, Kepala Puskesmas, dan Tokoh Masyarakat untuk memberi masukan dan mengeluarkan kebijakan. Hal ini juga tercantum didalam Peraturan Bupati tentang pencegahan stunting melibatkan lintas sector terkait, lembaga/oragnisasi kemasyarakatan, sekolah/ lembaga pendidikan, pakar dan tempat bermitra dengan swasta/dunia usaha untuk mendukung, mengkampanyekan, dan mendorong masyarakat untuk tercapainya masyarakat sehat di Kabupaten Luwu Timur.

Hasil penelitian di peroleh informasi yang menilai SDM secara keseluruhan bahwa kerjasama lintas sector dalam mendukung Peraturan Bupati tentang pencegahan dan penanggulangan Stunting di Kabupaten Luwu Timur sangat berpengaruh dalam penurunan prevalensi stunting dengan mengaktifkan sosialisasi dengan memberikan pemahaman yang di bantu oleh kader-kader kesehatan untuk mengajak masyarakat mencegah dan menanggulangi permasalahan stunting. Penelitian ini selaras dengan Permanasari et al. (2020) yang menekankan pentingnya konvergensi dalam penanggulangan stunting di Indonesia. Konvergensi ini mengintegrasikan kegiatan rutin berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mewujudkan penanggulangan stunting yang terpadu dan menyeluruh di semua aspek kehidupan.

Hasil penelitian juga di dapatkan informasi bahwa tenaga kesehatan serta kader kesehatan masih memerlukan pelatihan untuk pengembangan pengetahuan terkait stunting untuk mengoptimalkan penurunan prevalensi stunting di kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini mendukung temuan Munawaroh (2022) yang menekankan peran krusial tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan stunting melalui edukasi dan penyediaan informasi yang memadai bagi keluarga. Peran ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang stunting. Hal ini selaras dengan penelitian (Ginting 2020) yang menunjukkan masih terdapat kekurangan dalam optimalisasi peran tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan stunting.

Ketersediaan Dana

Untuk mendukung kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur maka ketersedian dana merupakan salah satu factor yang memiliki peranan penting. Hasil penelitian didapatkan informasi bahwa realisasi anggaran dalam percepatan penurunan stunting bersumber dari APBD yang disesuaikan dengan keuangan daerah. Penelitian ini juga sejalan dengan Nurlela, 2022) Alokasi belanja negara pada APBN atau APBD merupakan salah satu faktor penentu pencapaian tujuan pembangunan di indonesia. pada fungsi kesehatan, belanja negara dapat mempercepat penurunan stunting. Pemerintah sangat berharap dana yang dikeluarkan dapat terserap dengan optimal sesuai dengan mekanisme pembayaran yang berlaku.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kesehatan yang memadai merupakan komponen fundamental dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Fasilitas ini berperan penting dalam mendukung berbagai upaya pelayanan kesehatan, baik untuk individu maupun masyarakat secara luas. Untuk mendukung kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu timur maka ketersedian sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang memiliki peranan penting. Hasil penelitian di peroleh informasi bahwa ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung Peraturan Bupati tentang pencegahan dan penanggulangan Stunting di Kabupaten Luwu Timur masih belum optimal secara keseluruhan. Hasil penelitian juga diperoleh informasi bahwa Ketersedian Sarana dan prasarana yang mendukung dalam penurunan stunting di desa sudah lebih baik dibanding dengan kelurahan yang belum optimal dikarenakan belum adanya regulasi terkait dana kelurahan guna mendukung kecukupan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan program penanggulangan stunting.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Hambatan yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur terkhusus Kecamatan Malili dalam proses penerapan Kebijkan stunting dari segi Sarana dan Prasarana adalah belum lengkapnya sarana dan prasarana dan hal ini akan terus dievaluasi kedepannya. Belum semua posyandu yang memiliki alat pemeriksaan dan pengukuran terutama untuk kelurahan dan kurangnya alat untuk penyuluhan ke masyarakat. Penelitian ini mendukung temuan (Husnul Hotimah, 2021) yang mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan pencegahan stunting. Kurangnya dukungan dalam hal sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan menjadi faktor penghambat utama. Contohnya, keterbatasan sarana dan prasarana pemantauan pertumbuhan balita di Puskesmas dan Posyandu, serta minimnya anggaran di tingkat kelurahan. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat dan partisipasi dalam kegiatan Posyandu juga turut menghambat upaya penanggulangan stunting. Hal ini menyebabkan keterbatasan tenaga kesehatan dalam mendata balita dan memantau perkembangannya.

Efektivitas Program Berdasarkan Proses

Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendukung berjalannya peraturan bupati tentang pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pelaksanaan kebijakan stunting sampai saat ini dirasa sudah maksimal (terlaksana) karena hampir setiap saat Puskesmas dan kader kesehatan melaksanakan sosialisasi tentang penanggulangan stunting yang difokuskan pada kegiatan posyandu yang dilaksanakan setiap bulan dan kunjungan rumah yang dilakukan oleh kader TPK. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan informasi bahwa semua kegiatan didalam program penanggulangan stunting terlaksana dengan baik sesuai dengan SOP kegiatan puskesmas yang dilaksanakan dengan koordinasi seluruh tenaga kesehatan.

Penelitian (Annisa Faradillah, 2022) menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memerangi stunting melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Beragam program intervensi gizi spesifik dan sensitif telah digagas oleh kementerian/lembaga terkait, dengan potensi signifikan untuk menurunkan angka stunting. Salah satu contohnya adalah Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Dalam kegiatan posyandu, Petugas Kesehatan dan Kader Kesehatan memberikan sumplemen yang dibutuhkan ibu dan balita, PMT, serta penyuluhan dan konseling kesehatan gizi kepada ibu hamil dan ibu balita untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Ibu balita agar terjadi perubahan perilaku yang lebih baik. Hasil penelitian juuga menunjukkan bahwa ibu yang memiliki balita sudah rutin membawa anaknya melaksanakan kegiatan posyandu.

Berdasarkan hasil penelitian juga didapatkan informasi bahwa semua kegiatan program pengembangan juga telah terlaksana dengan koordinasi seuluruh OPD terkait, tenaga kesehatan, dan kader kesehatan, hanya saja masih kurang dari keterlibatan masyarakat. Pada penelitian ini menemukan bahwa monitoring dan evaluasi program stunting di Puskesmas dilakukan melalui dua jenis lokakarya: 1) Lokakarya mini internal Puskesmas: Dilaksanakan setiap bulan untuk mengevaluasi kemajuan program secara internal di Puskesmas, 2) Lokakarya mini lintas sektor: Dilaksanakan setiap 3 bulan untuk melibatkan berbagai pihak terkait dalam monitoring dan evaluasi program, termasuk lintas sektor. Penelitian ini mengidentifikasi dua kendala utama dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting: 1) Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat: Masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik tentang stunting, penyebabnya, dan cara pencegahannya. Hal ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam program stunting, 2) Rendahnya partisipasi masyarakat di Posyandu: Banyak masyarakat, terutama yang memiliki balita, tidak rutin menghadiri Posyandu. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan akses terhadap berbagai layanan penting, seperti penimbangan, imunisasi lengkap, dan edukasi kesehatan.

Efektivitas Program Berdasarkan Output

Penelitian ini menemukan beberapa dampak positif dari kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting yang dirasakan oleh masyarakat:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat: Masyarakat sudah mulai memahami bahwa stunting disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu lama.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

2. Pemahaman yang lebih baik tentang stunting: Istilah "stunting" tidak lagi asing bagi masyarakat, dan mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa itu stunting dan bagaimana dampaknya terhadap anak-anak.
3. Penurunan angka stunting: Penerapan peraturan bupati tentang pencegahan stunting menunjukkan hasil yang positif dengan menurunkan angka stunting di daerah tersebut.

Selain itu dampak yang dirasakan oleh ibu hamil dan ibu balita dengan adanya kebijakan stunting di kabupaten Luwu Timur adalah ibu aktif datang ke posyandu untuk menimbang anak balita merupakan upaya untuk memantau kesehatan anak atau meningkatkan status gizinya. Penelitian ini selaras dengan temuan Nurbudiwati et al. (2021) dan Saputri RA (2019) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan pemantauan tumbuh kembang anak dalam upaya pencegahan stunting. Penelitian ini mendukung temuan (K Pratiwi Yunus, 2021) dan (Priyono, 2020) yang menekankan peran penting kader kesehatan sebagai motor penggerak dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi stunting. Peran kader kesehatan: 1) Motor penggerak: Kader kesehatan di desa, berkolaborasi dengan bidan desa, dapat menjadi motor penggerak dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan, khususnya stunting. 2) Pemberdaya masyarakat: Kader kesehatan diharapkan dapat memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengatasi masalah kesehatan, khususnya stunting. Pentingnya pemberdayaan kader: 1) Meningkatkan pengetahuan: Pemberdayaan kader melalui pelatihan atau penyuluhan diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang permasalahan gizi pada masyarakat, khususnya balita, 2) Penerapan informasi baru: Dengan pengetahuan yang baru, kader kesehatan dapat menerapkannya dalam pelayanan Posyandu, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas program penanggulangan stunting.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas program terkait Input
   a. Kebijakan: Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Luwu Timur dalam mendukung upaya percepatan dan penanggulangan stunting adalah peraturan bupati Luwu Timur tentang Penetapan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi Tahun 2022 dengan keterlibatan berbagai lintas sector.
   b. Keterlibatan SDM: Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPSS) untuk berperan dalam program penanggulangan stunting, namun dalam hal sumber daya Kesehatan dipuskesmas terkhususnya pada kecamatan Malili masih belum optimal.
   c. Ketersediaan Dana: Masalah anggaran yang digunakan untuk menjalankan program penanggualangan penuruan stunting di bahas di dalam peraturan bupati poin ke 3, yakni dan untuk penanggulangan stunting di kabupaten Luwu Timur berasal dari APBD Daerah Kabupaten Luwu Timur.
   d. Ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menjalankan program pencegahan stunting tidak di bahas secara rinci di dalam peraturan bupati. Dari hasil penelitian, menurut informan, sarana dan prasarana masih belum optimal terutama di tingkat kelurahan.
2. Efektivitas program terkait Proses
   a. Program yang diatur dalam peraturan bupati telah dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dari kegiatan sosialisasi stunting yang rutin dilakukan puskesmas melalui posyandu setiap bulan. Pelaksanaan program ini diperkuat oleh kebijakan lain yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting secara maksimal.
   b. Salah satu kendala dalam penerapan kebijakan stunting di Kabupaten Luwu Timur adalah rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat. Upaya untuk mengatasi kendala ini adalah dengan melibatkan stakeholder dan organisasi perangkat daerah.
3. Efektivitas program terkait Output
   Kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan hasil yang positif dengan penurunan kasus stunting yang konsisten setiap tahunnya. Sejak diberlakukannya Peraturan Bupati Tahun 2022 pada tahun angka stunting di Luwu Timur berhasil diturunkan hingga mencapai 14,6%.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

DAFTAR PUSTAKA

Adhi, D. A., Rini, P. S., & Sari, M. I. (2021). Peran kader Posyandu dalam meningkatkan pengetahuan dan praktik pemberian MPASI optimal pada ibu balita di Kabupaten Klaten. Jurnal Gizi dan Kesehatan, 10(2),

Annissa Faradilla, Nurmiati Muchlis, Reza Aril Ahri. 2022 . Kajian Kejadian Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Moncongloe Kabupaten Maros. https://pascaumi.ac.id/index.php/jmch/article/download/1321/1512/5848

Astutik, Rahfiludin, M.Z., & Aruben, R. 2018. Faktor Risiko Kejadian *Stunting* Pada Anak Balita Usia 24-59 Bulan (Studi Kasus di Wilayah Kerja Puskesmas Gabus II Kabupaten Pati Tahun 2017). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 6(1):409-418.

Ayustawati. 2019. *Kehamilan*. Bali: Informasi Medika.

Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. 2018. *Angka Balita Stunting Bulan September Tahun 2018.* Jember: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

Dahlia, Eny Arlini Wello, dkk. 2021. Literature Review Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Stunting pada Anak Balita https://fmj.fk.umi.ac.id/index.php/fmj/article/download/70/66/

Fatimah, N.S.H., & Wirjatmadi, R.B. 2018. Tingkat Kecukupan Vitamin A, Seng dan Zat Besi serta Frekuensi Infeksi pada Balita *Stunting* dan Non *Stunting*. *Jurnal Media Gizi Indonesia*, 13(2):168-175.

Febrian F, Yusran R. 2021. Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik; 3(1): hal 11-21

Hapsari, W. 2018. Hubungan Pendapatan Keluarga, Pengetahuan Ibu tentang Gizi, Tinggi Badan Orang Tua dan Tingkat Pendidikan Ayah dengan Kejadian *Stunting* pada Anak Umur 12-59 Bulan. Dipublikasikan. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Imelda., Rahman N., & Nur R. 2018. Faktor Risiko Kejadian Stunting pada Anak Umur 2-5 Tahun di Puskesmas Biromaru. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 2(1): 39-43.

Indriani, D., Dewi, Y.L.R., Murti, B., & Qadrijati, I. 2018. Prenatal Factors Associated with the Risk of Stunting: A Multilevel Analysis Evidence From Nganjuk, East Java. *Jorunal Of Maternal and Child Health*, 3 (4): 294-300.

Kementerian Kesehatan RI. 2014a. *Pedoman Gizi Seimbang*. Jakarta: Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA.

Kementerian Kesehatan RI. 2018b. *Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2017*. Jakarta : Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Kementerian Kesehatan RI. 2018c. *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Kementerian Kesehatan RI. 2018d. *Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2018. *Profil Anak Indonesia 2018*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masrona, & Ainy, U. (2021). Implementasi Program Inovasi "Payung Penting" dan "Gaya Puspaku" di Puskesmas Pakem, Kabupaten Sleman. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 25(2), 127-134.

Nur Lela, Haeruddin, Andi Rizki Amelia.2022. Hubungan Penggunaan Dana Desa dengan Penurunan Kasus Stunting di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. http://repository.umi.ac.id/5577/1/1421-Article%20Text-6298-1- 10-20230224.pdf

Nabila Maulidiana Andi Husni Esa Darussalam,Rachmat Faisal Syamsu.2024. Hubungan Pola Asuh Ibu dengan Kejadian Stunting pada Anak Balita di Puskesmas Madello Kab.Barru 2024. https://fmj.fk.umi.ac.id/index.php/fmj/article/ download/405/263/

Norsanti. 2021. Efektivitas program percepatan penurunan stunting di kecamatan batumandi kabupaten balangan (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan; Vol.3: hal 10 – 21.

Notoatmodjo, S. 2018. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta. Pormes, W.E., Rompas, S., & Ismanto, A.Y. 2014. Hubungan Pengetahuan Orang Tua tentang Gizi dengan Kejadian

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Stunting Pada Anak Usia 4-5 Tahun di TK Malaekat Pelindung Manado. *Jurnal Keperawatan*, 2(2):1-6.

Nurbudiwati, Kania I., Purnawan R.A., Mufti I. 2020. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Garut. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara; 7(2): 333-49.

Purwati, S. R., Mahanani, S. R., & Utami, S. D. (2018). Peran kader kesehatan dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak di wilayah kerja Puskesmas Wates Kabupaten Kediri. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 13(2), 144-150.

Putri, Reza Aril Ahri. 2022. Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Kota Makassar.

Saputri RA. 2019. Upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting di provinsi kepuluan Bangka Belitung. Jurnal dinamika pemerintahan; 2(2): hal 152-68.

Saragih, B. (2018). Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu dengan Kunjungan Posyandu pada Balita di Desa Pagarbatu Kecamatan Sibolangit Kabupaten Simalungun. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 13(2), 117- 122.

Sastrawan, W., Widiyanti, H., & Marliandini, R. (2020). Efektivitas Program Si Mamah Riang Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Primigravida Tentang Pemberian Makanan Pendamping ASI Di Wilayah Puskesmas Kota Padang. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 15(4), 347-353.

Satriawan, E. 2018. *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018- 2024*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license